

Relevansi Ayat-Ayat Politik Al-Qur'an dalam Tata Kelola Pemerintahan Modern: Kajian Kualitatif Tafsir Tematik

M Habib Alhabsyi^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

E-mail: alhabsyhabib@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1467>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 15 June 2025

Revised: 21 June 2025

Accepted: 27 June 2025

Kata Kunci:

Tafsir Tematik, Ayat Politik, Good Governance, Pemerintahan Islam, Al-Qur'an, Kepemimpinan, Keadilan.

Keywords:

Thematic Interpretation, Political Verses, Good Governance, Islamic Government, Qur'an, Leadership, Justice.



ABSTRACT

Dalam pemahaman Islam yang menyeluruh, aspek politik memiliki posisi yang krusial dalam mengatur kehidupan komunitas secara keseluruhan, mencakup bidang sosial, hukum, ekonomi, hingga administrasi pemerintahan. Al-Qur'an menyimpan banyak ayat yang secara eksplisit ataupun implisit membahas berbagai topik terkait kekuasaan, kepemimpinan, keadilan, tanggung jawab, dan musyawarah. Ayat-ayat ini dikenal sebagai ayat terkait politik karena mengandung prinsip-prinsip fundamental dalam membentuk sistem pemerintahan yang etis dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan ayat-ayat politik dalam Al-Qur'an terhadap prinsip-prinsip pemerintahan modern dengan pendekatan penelitian kualitatif dan menggunakan metode tafsir tematik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai politik yang tercantum dalam Al-Qur'an, seperti keadilan, amanah, musyawarah, serta kepemimpinan yang berbasis pada kompetensi, sejalan dengan prinsip *good governance* yang terdiri dari akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan supremasi hukum. Melalui penafsiran yang kontekstual dan integratif, ayat-ayat politik dalam Al-Qur'an dapat memberikan kontribusi berarti dalam merumuskan model pemerintahan yang lebih adil, partisipatif, dan beradab.

In the comprehensive understanding of Islam, the political aspect has a crucial position in regulating the life of the community as a whole, including the social, legal, economic, and government administration fields. The Qur'an contains many verses that explicitly or implicitly discuss various topics related to power, leadership, justice, responsibility, and deliberation. These verses are known as political verses because they contain fundamental principles in establishing an ethical and responsible system of government. This study aims to examine the relationship of political verses in the Qur'an to the principles of modern governance with a qualitative research approach and using the thematic interpretation method. The findings show that the political values listed in the Qur'an, such as justice, trust, deliberation, as well as competency-based leadership, are in line with the principles of good governance consisting of accountability, participation, transparency, and the rule of law. Through contextual and integrative interpretation, political verses in the Qur'an can make a meaningful contribution in formulating a more just, participatory, and civilized governance model.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: M Habib Alhabsyi (2025). Relevansi Ayat-Ayat Politik Al-Qur'an dalam Tata Kelola Pemerintahan Modern: Kajian Kualitatif Tafsir Tematik, 3(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1467>

PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam yang komprehensif, urusan politik memainkan peranan krusial, mencakup beragam sisi kehidupan manusia, termasuk bidang sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Islam tidak

sekadar menekankan ibadah pribadi, tetapi juga menata interaksi sosial dan sistem pemerintahan secara holistik melalui tuntunan wahyu yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Banyak ayat dalam Al-Qur'an, baik secara langsung maupun tidak langsung, membahas isu kekuasaan, kepemimpinan, keadilan, musyawarah, serta amanah, yang bisa dikelompokkan sebagai ayat-ayat politik.

Adanya ayat-ayat politik ini mengukuhkan bahwa Al-Qur'an mengandung fondasi moral dan etika yang esensial untuk diterapkan dalam praktik pemerintahan. Menurut Nasaruddin Umar, interpretasi terhadap ayat-ayat politik memberi pemahaman bahwa Islam menginginkan sistem kekuasaan yang berkeadilan, partisipatif, serta bertanggung jawab. Ini selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dipakai dalam pemerintahan modern, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, dan efisiensi. Akan tetapi, masih ada jurang pemisah antara teks-teks keagamaan yang bersifat normatif dan praktik kekuasaan yang cenderung pragmatis dan sekuler.

Oleh karena itu, dibutuhkan cara menafsirkan secara tematik yang tidak hanya membaca teks secara tekstual, namun juga memperhatikan latar belakang sejarah dan sosiologi, agar ayat-ayat politik dalam Al-Qur'an bisa diimplementasikan secara relevan dalam konteks sekarang ini. Penelitian ini bermaksud mengkaji relevansi ayat-ayat politik yang ada di Al-Qur'an dengan prinsip-prinsip pemerintahan modern. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, memakai metode studi kepustakaan dan analisis tematik terhadap beberapa ayat Al-Qur'an yang memuat nilai-nilai politik Islam. Diharapkan, temuan dari penelitian ini mampu memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip politik Islam tidak hanya normatif atau teologis, tetapi juga sejalan dan berkontribusi dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang adil dan beradab.

Studi tentang bagaimana ayat-ayat politik dipahami dalam Al-Qur'an menjadi bagian penting dalam studi keislaman, baik dulu maupun sekarang. Dalam sejarah, diskusi tentang politik dalam Islam sering muncul dalam karya fiqh siyasah yang lebih menekankan aturan tentang kekuasaan, seperti pentingnya taat pada pemimpin dan keharusan menegakkan keadilan. Al-Mawardi adalah tokoh kunci dalam bahasan ini; dalam bukunya, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, ia menjelaskan bagaimana struktur kekuasaan politik Islam dan tanggung jawab pemimpin menurut prinsip syariat. Tapi, cara yang dipakai ulama dulu cenderung kaku dan kurang menggali relevansi ayat politik dalam konteks pemerintahan masa kini.

Di dunia tafsir sekarang, Quraish Shihab adalah salah satu tokoh yang memberi kontribusi penting dalam menafsirkan ayat-ayat sosial-politik. Dalam bukunya, *Wawasan Al-Qur'an*, Shihab menyatakan bahwa Al-Qur'an punya nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial yang sangat penting untuk membangun masyarakat dan pemerintahan yang adil. Ia menekankan bahwa ayat-ayat ini tidak hanya punya latar belakang sejarah, tapi juga jadi panduan etis dalam menjalankan kekuasaan di setiap zaman.

Dalam hal ini, Buya Hamka lewat *Tafsir Al-Azhar* menekankan pentingnya musyawarah dalam sistem kekuasaan. Baginya, syura bukan cuma sistem diskusi dalam Islam, tapi juga cara masyarakat berpartisipasi yang bisa jadi dasar membangun sistem demokrasi yang berakar pada nilai agama. Tafsir ini juga bilang bahwa pemerintah Islami bukan cuma yang berbentuk khilafah, tapi yang menjunjung tinggi nilai etika dan keadilan.

Lalu, Nasaruddin Umar dalam studi tafsir politiknya menekankan pentingnya memahami konteks saat memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Ia menyoroti pentingnya menafsirkan ulang wahyu agar tidak terjebak dalam pemahaman yang kaku, terutama untuk menjawab tantangan zaman seperti korupsi, otoritarianisme, dan merosotnya moral politik. Pendekatan kontekstual ini juga menggabungkan tafsir Al-Qur'an dengan ilmu sosial modern, termasuk sosiologi politik dan teori pemerintahan.

Taufik Adnan Amal berpendapat bahwa tafsir politik saat ini bukan cuma soal fiqh-siyasah, tapi juga tentang etika publik dan nilai-nilai universal dalam Islam. Ia yakin bahwa prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi punya dasar yang kuat dalam Al-Qur'an lewat konsep seperti *al-'adl* (keadilan), amanah (tanggung jawab), dan syura (musyawarah). Jadi, pendekatan tematik pada ayat-ayat politik tidak hanya memperdalam pemahaman teologis tapi juga bisa berkontribusi dalam membentuk sistem pemerintahan yang lebih manusiawi dan etis.

Tinjauan literatur di atas menunjukkan adanya keinginan kuat untuk menghubungkan ayat-ayat politik dalam Al-Qur'an dengan sistem pemerintahan modern. Tapi, studi yang secara spesifik

menghubungkan ayat-ayat itu dengan kerangka tata kelola pemerintahan modern atau *good governance* masih sedikit. Oleh karena itu, penelitian ini fokus untuk mengisi celah itu dengan pendekatan tafsir tematik dan analisis kualitatif terhadap ayat-ayat politik yang dianggap relevan dengan nilai pemerintahan yang adil dan partisipatif.

METODE

Studi ini memakai cara pandang kualitatif memakai metode interpretasi tematik (*tafsir maudhû'î*), yang punya tujuan menggali lebih dalam pesan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait erat dengan dunia politik, lalu menghubungkannya secara relevan dengan dasar-dasar penting pemerintahan modern. Cara kualitatif dipilih karena memberi ruang bagi peneliti untuk menafsirkan arti teks dengan cara yang lebih luwes, terbuka, dan tidak kaku dengan angka atau kesimpulan statistik¹.

Tafsir tematik dikerjakan dengan mengumpulkan sejumlah ayat Al-Qur'an yang membahas topik khusus, yaitu politik, kepemimpinan, keadilan, amanah, musyawarah, dan pedoman utama dalam mengatur kehidupan sosial dalam konteks bernegara. Ayat-ayat yang terkumpul lalu dikaji dari berbagai sisi, baik dari aspek bahasa, sejarah (*asbâbun nuzûl*), dan pandangan para ahli tafsir baik yang dulu maupun sekarang. Pendekatan ini mewujudkan analisis yang terstruktur dan komprehensif pada seluruh ayat yang punya hubungan makna dan konsep dalam satu tema besar, yaitu "politik dalam Al-Qur'an".

Data utama dalam riset ini ialah Al-Qur'an sebagai objek kajian, sementara data pendukung meliputi kitab-kitab tafsir yang bersifat klasik dan modern seperti Tafsir Al-Azhar oleh Hamka, Wawasan Al-Qur'an karya Quraish Shihab, dan Kodifikasi Al-Qur'an dan Tafsirnya oleh Nasaruddin Umar. Selain itu, sumber ilmiah lain seperti jurnal keislaman dan karya tentang pemikiran politik Islam masa kini juga dipakai.

Cara pengumpulan data dijalankan dengan teknik studi dokumentasi, yaitu telaah pustaka terhadap kitab tafsir, buku, dan jurnal yang membahas ayat-ayat politik dan asas pemerintahan. Proses ini diawali dengan pemilihan ayat-ayat politik seperti QS. Al-Baqarah: 247, QS. An-Nisa: 58, QS. Asy-Syura: 38, dan QS. Al-Ma'idah: 8. Ayat-ayat tersebut dikaji melalui tahapan berikut:

1. Menentukan tema yang lebih luas (politik dalam Al-Qur'an);
2. Mengenali ayat-ayat yang berkaitan dengan tema;
3. Menganalisis arti ayat dengan pendekatan bahasa, sejarah, dan tafsir;
4. Merumuskan prinsip-prinsip politik yang dapat diambil dari ayat-ayat tersebut;
5. Menganalisis kesesuaian prinsip-prinsip tersebut dengan nilai-nilai pemerintahan modern seperti *good governance*.

Analisis dikerjakan secara induktif dan reflektif, dengan menarik pesan dari teks ke dalam kondisi sosial-politik saat ini. Guna memastikan kebenaran data, dipakai teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan tafsir dari beberapa ahli tafsir untuk memperoleh penafsiran yang menyeluruh dan tidak berat sebelah.

Dengan cara ini, diharapkan studi ini bisa menghasilkan pemahaman tafsir yang tak cuma tekstual dan normatif, tapi juga terpakai dan relevan terhadap dinamika pemerintahan modern yang berlandaskan pada etika politik Al-Qur'an.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sejumlah ayat dalam Al-Qur'an menyimpan prinsip-prinsip fundamental dalam pengelolaan pemerintahan yang sejalan dengan nilai-nilai politik modern. Nilai-nilai tersebut mencakup keadilan, kepercayaan, musyawarah, kemampuan kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial-politik. Semua nilai ini didapat melalui metode tafsir tematik terhadap beberapa ayat yang secara langsung berkaitan dengan konsep kekuasaan dan etika kepemimpinan.

Konsep keadilan dapat ditemukan dalam QS. Al-Mâ'idah [5]: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

yang menekankan pentingnya bersikap adil, bahkan kepada kelompok yang kurang disukai. Dalam ayat

ini ditegaskan: "Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Keadilan menurut Al-Qur'an bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga merupakan prinsip utama dalam menjalankan kekuasaan dengan benar dan bertanggung jawab. Prinsip ini sejalan dengan ide hukum berkeadilan dalam sistem pemerintahan saat ini.

Nilai kepercayaan dijelaskan secara jelas dalam QS. An-Nisâ' [4]: 58,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

di mana Allah memerintahkan agar amanah diserahkan kepada yang berhak dan keputusan diambil secara adil. Ayat ini memberikan landasan etis bahwa kekuasaan adalah sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh individu yang dihormati dan dapat diandalkan. Dalam konteks saat ini, kepercayaan ini sama dengan akuntabilitas pejabat publik terhadap masyarakat dan sistem.

Al-Qur'an juga memberikan landasan partisipasi dalam pengambilan keputusan melalui QS. Asy-Syûrâ [42]: 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Dalam ayat ini, dinyatakan bahwa urusan orang-orang beriman ditentukan melalui musyawarah. Ini menunjukkan bahwa prinsip deliberasi dan partisipasi masyarakat adalah unsur penting dalam pengelolaan kekuasaan menurut ajaran Islam.

Nilai kemampuan dalam kepemimpinan tersirat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 247

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَةً مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٤٧﴾

yang menggambarkan kisah penunjukan Thalut sebagai raja. Meskipun ia ditolak karena bukan berasal dari kalangan bangsawan, Allah memilih Thalut karena keunggulan pengetahuan dan kekuatan yang dimilikinya. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak ditentukan oleh status sosial atau garis keturunan, melainkan oleh kapabilitas, integritas, dan kemampuan untuk menjalankan amanah publik.

Pembahasan

Temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak sekadar membahas aspek ibadah dan etika individu, tetapi juga menetapkan dasar normatif bagi sistem sosial dan politik yang adil serta partisipatif. Ayat-ayat yang telah dianalisis mengungkapkan bahwa nilai-nilai seperti keadilan, amanah, musyawarah, kompetensi, serta tanggung jawab sosial sangat relevan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Prinsip keadilan yang terdapat dalam QS. Al-Mâ'idah [5]: 8

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

adalah konsep universal yang menjadi fondasi dari semua sistem politik yang sehat, baik dalam kerangka Islam maupun pemerintahan demokratis modern. Dalam struktur pemerintahan saat ini, keadilan menjadi tolok ukur kesuksesan dalam pelaksanaan hukum, perlindungan hak-hak warga negara, dan distribusi kekuasaan serta sumber daya secara merata. Dalam Islam, keadilan bukan hanya nilai sosial, tetapi juga merupakan prinsip ilahi yang melekat pada sifat Allah sebagai al-'Adl.

Amanah yang diuraikan dalam QS. An-Nisâ' [4]: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

menjadikan kekuasaan sebagai tanggung jawab moral dan sosial. Ide ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan modern, di mana setiap pejabat publik wajib bertanggung jawab atas kebijakan, keputusan, dan pengelolaan sumber daya yang mereka lakukan. Dalam pemahaman Islam, pelanggaran terhadap amanah dianggap bukan sekedar kesalahan administrasi, tetapi juga pengkhianatan terhadap Allah dan umat.

Nilai musyawarah yang ditekankan dalam QS. Asy-Syûrâ [42]: 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٨٣﴾

sangat berkaitan dengan prinsip partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Dalam kerangka demokrasi saat ini, musyawarah setara dengan proses deliberative yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, termasuk melalui lembaga perwakilan, forum publik, maupun konsultasi sosial. Konsep ini menegaskan bahwa Al-Qur'an memberikan ruang bagi partisipasi rakyat dalam struktur kekuasaan, yang dapat diterapkan dalam berbagai sistem politik selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam.

Selain itu, pemilihan Thalut dalam QS. Al-Baqarah [2]: 247

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَتَىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكَةً مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾

menggambarkan bahwa kepemimpinan yang berdasarkan kompetensi adalah bagian dari mekanisme politik dalam Islam. Kepemimpinan ditentukan bukan oleh keturunan atau materi, tetapi oleh kualitas intelektual dan moral. Ini sejalan dengan prinsip kepemimpinan berdasarkan prestasi yang menjadi acuan dalam birokrasi modern, di mana posisi-posisi strategis harus diisi oleh individu yang memiliki kompetensi, bukan karena hubungan sosial atau nepotisme.

Jika dilihat secara menyeluruh, prinsip-prinsip yang ditarik dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut memiliki makna penting dalam menciptakan model tata kelola pemerintahan yang tidak hanya efektif secara struktural, tetapi juga etis secara substansial. Dengan demikian, tafsir tematik terhadap ayat-ayat politik dalam Al-Qur'an dapat menjadi landasan bagi pengembangan sistem pemerintahan modern yang tidak hanya berpijak pada aspek legalitas formal, tetapi juga pada nilai-nilai moral-spiritual yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

SIMPULAN

Kajian ini memperlihatkan bahwa Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, bukan sekadar membahas ritual keagamaan, melainkan juga menyimpan nilai-nilai politik yang sangat relevan untuk tata kelola pemerintahan masa kini. Melalui metode tafsir tematik, terungkap bahwa ayat-ayat seperti QS. Al-Mâ'idah: 8, QS. An-Nisâ': 58, QS. Asy-Syûrâ: 38, serta QS. Al-Baqarah: 247 memuat prinsip-prinsip dasar yang esensial dalam membangun sistem pemerintahan yang berkeadilan, inklusif, dan berlandaskan etika.

Nilai keadilan dalam Al-Qur'an menekankan pentingnya bersikap adil dan objektif saat membuat keputusan dan menegakkan hukum. Konsep amanah mengajarkan bahwa kekuasaan adalah tanggung jawab besar yang harus diemban oleh orang yang tepat. Musyawarah adalah wujud partisipasi masyarakat yang terbuka, sementara kepemimpinan yang mumpuni adalah syarat mutlak agar kekuasaan tidak dipegang oleh orang yang salah.

Interpretasi kontekstual terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan bidang politik ini memberi peluang untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber etika politik yang fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan secara tepat dan efektif ke dalam struktur pemerintahan modern, menjadikan Al-Qur'an sebagai fondasi moral dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kemanusiaan.

REFERENSI

- Abdullah, Amin. *Studi Agama Normatif-Kultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Amal, Taufik Adnan. *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi tentang Pemikiran Politik Islam Kontemporer*. Jakarta: Paramadina, 2018.
- Azra, Azyumardi. *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih*. Bandung: Mizan, 2000.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 4 dan 9. Jakarta: Panjimas & Pustaka Panjimas, 1990.
- Muhtadi, Asep Usman. *Fiqh Siyasah: Teori dan Praktik Politik Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid 2. Jakarta: UI Press, 1990.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 3. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2002.
- Umar, Nasaruddin. *Kodifikasi Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: UI Press, 2016.